

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang
Terdaftar di BEI Pada Tahun 2015-2019)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Rakha Nur Rahman

No. Mahasiswa: 16312346

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang
Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untu mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Rakha Nur Rahman

No. Mahasiswa: 16312346

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 November 2020

Penulis,



(Rakha Nur Rahman)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang
Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Diajukan Oleh:

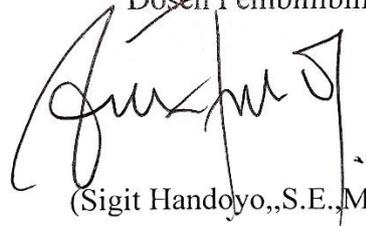
Nama: Rakha Nur Rahman

No. Mahasiswa: 16312346

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal...12 Nov 2020

Dosen Pembimbing,



(Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.)

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah : 153)

“Sementara itu, orang-orang yang beriman, mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Mereka yakin dengan janji Allah bahwa pada setiap kesulitan itu diapit oleh kemudahan”

(Qs. Al-isnyirah : 6)

“Jangan malas karena musuh terbesar dalam hidup itu bukan orang lain, tetapi rasa malas yang ada dalam diri kita sendiri”

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan pantang menyerah”

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:
Papa dan Mamaku tercinta & seluruh orang tersayang,
yang selalu ada di kala suka ataupun duka dan tidak pernah
berhenti memberikan dukungan serta doa terbaiknya.*

الجمعة المباركة
الاستاذ الاندو

KATA PENGANTAR



Assalamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis dan shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2015-2019)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia serta nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga selalu diberikan kemudahan, petunjuk, dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi.

2. Nabi Muhammad SAW. Yang selalu menjadi tokoh idola untuk kita semua.
3. Kedua orangtua penulis, Papah dan Mamah, Papa Priyanto dan Mama Rustiati. Terimakasih atas segala doa, semangat dan dukungan yang telah Papa dan Mama curahkan serta segala harapan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat melalui segala rintangan dan cobaan yang ada. Semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan lindungan oleh Allah SWT.
4. Diah Wahyu Ningtyas, Ida Nur Cahyani, Luqman Adhi Kuncoro serta Karbita Tri Novani selaku kakak penulis. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta telah menjadi seseorang yang menemani, melindungi, mendukung dan memotivasi hingga saat ini. Terimakasih untuk segala momen yang telah dilalui bersama dari kecil hingga bisa seperti ini.
5. Adny, Helmy, dan Alka selaku keponakan penulis. Terimakasih telah menjadi penghibur selama penulis mengerjakan penelitian.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Jaka Sriyana., S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Sigit Handoyo.,S.E.,M.Bus. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih selalu penuh kesabaran dalam memberikan ilmu, bimbingan, waktu, kritik, saran, dan arahan serta motivasi yang sangat bermanfaat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan selama

penulis mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Kumalahadi, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelajaran yang sangat bermanfaat.
11. Wida, Irsa, Hanan, Adhis, dan Raras selaku teman dekat penulis. Terimakasih atas segala canda tawa, cerita serta keluh kesah selama masa penulisan ini. Terima kasih sudah menjadi penghibur bagi penulis disaat penulis pusing dan stres mengerjakan skripsi. Sukses untuk teman-teman semua, semoga segala usaha, doa, dan harapan teman-teman semua dapat terwujud dan menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
12. Byantra Gunawan selaku sahabat penulis. Terimakasih atas segala cerita, canda tawa, gosip, serta keluh kesah selama masa penulisan ini. Semoga segala cita-cita dan harapan dapat segera terwujud. Aamiin
13. Muhammad Arief, Abimanyu Surya, Gilang Baskara, Ahmad Reza, Hilwa Ega, Dianita Nur, Damayanti, Karina, Danuarta, Reza Dwi, Faesal Aji, Muhammad Abila, Hifzan Sadida serta Nirwan selaku temen seperjuangan kuliah. Terimakasih sudah memberikan segala canda tawa, ilmu, cerita, dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan. Semoga sukses dan sehat selalu untuk teman-teman semua.

14. Teman seperjuangan dalam proses penyusunan skripsi Dira, Piut dan Setya yang selalu memberikan semangat dan energi positif.
15. Teman-teman KKN Unit 43, Yoga, Riska, Ranu, Duta, Sella, Lyoni, serta Raghib. Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan proker dan menemani penulis dikala susah dan senang selama masa KKN di desa Gununggajah. Sehat selalu untuk teman-teman semua.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan motivasi atas kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Keagenan.....	15
2.1.2 Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	17
2.1.3 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	20
2.1.4 Profitabilitas.....	23
2.1.5 Ukuran Perusahaan	27
2.1.6 <i>Leverage</i>	28
2.1.7 Komite Audit.....	30
2.1.8 Kualitas Audit.....	32
2.1.9 Kepemilikan Institusional.....	34
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	35

2.3	Hipotesis Penelitian	42
2.3.1	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.....	42
2.3.2	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	44
2.3.3	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	46
2.3.4	Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	48
2.3.5	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	50
2.3.6	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	52
2.4	Model Penelitian.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Populasi dan Sampel	56
3.2	Jenis dan Sumber Data Penelitian	57
3.3	Variabel Penelitian	57
3.3.1	Variabel Independen	57
3.3.1.1	Profitabilitas	58
3.3.1.2	Ukuran Perusahaan	58
3.3.1.3	<i>Leverage</i>	59
3.3.1.4	Komite Audit	59
3.3.1.5	Kualitas Audit.....	60
3.3.1.6	Kepemilikan Institusional.....	61
3.3.2	Variabel Dependen	61
3.4	Metode Analisis Data	62
3.4.1	Statistik Deskriptif	62
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	62
3.4.2.1	Uji Normalitas.....	63
3.4.2.2	Uji Multikolonieritas.....	64
3.4.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	65
3.4.2.4	Uji Autokorelasi.....	66
3.4.3	Regresi Linier Berganda.....	67
3.4.3	Uji Hipotesis	69
3.4.2.1	Uji Signifikansi F	69
3.4.2.2	Uji Ketepatan Perkiraan (Koefisien Determinasi).....	69

3.4.2.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Statistik t).....	70
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Sampel Penelitian	72
4.2 Analisis Deskriptif.....	73
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	78
4.3.1 Uji Normalitas	78
4.3.2 Uji Multikolinieritas	79
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	81
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	82
4.4 Hasil Analisis Linier berganda	83
4.5 Pengujian Hipotesis	87
4.6 Hasil Koefisiensi Determinasi.....	88
4.7 Pembahasan	91
4.7.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.....	91
4.7.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.....	92
4.7.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	93
4.7.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	94
4.7.5 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	95
4.7.6 Pengaruh Kepemilikan Instiusional	95
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1 Simpulan.....	97
5.2 Keterbatasan Penelitian	98
5.3 Saran	98
5.4 Implikasi Penelitian	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson).....	67
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	73
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	74
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov	79
Tabel 4.4 Nilai Variance Inflation Factor (VIF)	80
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson	83
Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Regresi Berganda.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	55
Gambar 4.1 Diagram Scatterplot	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian	108
Lampiran 2 Data Hasil Perhitungan Variabel Independen	109
Lampiran 3 Hasil Penelitian.....	111



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2019. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 5 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Analisis data dilakukan dengan model regresi linier berganda dan menggunakan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan serta kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak kemudian komite audit serta kualitas audit terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* tidak terbukti berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of profitability, firm size, leverage, audit committee, audit quality and institutional ownership on tax avoidance behavior as measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR). The population in this study were mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2015 to 2019. This study used purposive sampling and obtained a sample of 5 companies. The data used are secondary data in the form of financial reports and annual reports. Data analysis was performed using multiple linear regression models and using SPSS software. The results of this study indicate that profitability, company size and institutional ownership are proven to have a positive and significant effect on tax avoidance behavior. Then the audit committee and audit quality are proven to have a negative and significant effect on tax avoidance behavior. Meanwhile, leverage is not proven to have an effect on tax avoidance behavior. This research can be taken into consideration for users of financial statements in making decisions.

Keywords: *tax avoidance, profitability, firm size, leverage, audit committee, audit quality, institutional ownership.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber penerimaan negara yang terbesar untuk pembangunan negara bagi pemerintah. Sebagai penerimaan negara terbesar, pajak harus terus ditingkatkan agar laju pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti yang tertuang didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak. Artinya, apabila jumlah penerimaan pajak pada negara semakin banyak maka semakin banyak pula infrastruktur dan fasilitas publik yang akan dibangun oleh pemerintah serta kualitas layanan negara kepada masyarakat juga semakin bertambah. Oleh sebab itu, pemerintah sangat menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak.

Pada kenyataanya, terdapat perbedaan kepentingan antara pelaksanaan wajib pajak dan pemerintah terkait dengan pembayaran pajak. pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Sedangkan bagi sebagian wajib pajak, pajak menjadi salah satu beban yang akan mengurangi tingkat laba yang akan diperoleh perusahaan dan mengurangi kesejahteraan pemegang saham, sehingga wajib pajak mengharapkan pembayaran pajak semimumimum mungkin. Perbedaan antar kepentingan tersebut

mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) meminimalkan pembayaran pajaknya.

Berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan, tercatat penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.055 triliun dari target sebesar Rp 1.294,25 triliun dengan pencapaian 81,5%. Di tahun 2016 sebesar Rp 1.105 triliun dari target sebesar Rp 1.533 triliun. Hal ini berarti realisasi penerimaan mengalami kenaikan mencapai 81,54%. Di Tahun 2017 kenaikan nilai realisasi penerimaan perpajakan kembali terjadi sebesar 91,0% atau mencapai Rp 1.339,8 triliun dari target Rp 1.450,9 triliun. Di Tahun 2018 realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 1.315,9 triliun atau naik sebesar 1,4% dari tahun sebelumnya. Realisasi pada target APBN ini naik mencapai 1,4% dari tahun sebelumnya atau 92,4% sebesar Rp 1.628 triliun, yang berarti penerimaan perpajakan pada tahun 2018 memiliki perolehan tertinggi yang mendekati APBN dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya ditahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4% dari target dalam APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Meski tidak tercapai target dalam APBN realisasi penerimaan pajak tahun ini tumbuh positif sebesar 1.43 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai sebesar Rp 1.315,9 triliun. Dari perbedaan antara target dan realisasi setiap tahun tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan dari sektor pajak belum sesuai dari yang diharapkan. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah adanya perlakuan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *tax avoidance*. James Kessler memberikan pengertian penghindaran pajak sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dari tujuan dan maksud dibuatnya Undang-Undang (*the intention of parlement*). Sedangkan menurut (Pohan, 2013) penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya namun tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (legal), yang artinya penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan aman bagi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Metode yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak biasanya dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Modus Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) merupakan modus yang biasanya digunakan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang (legal). Modus lain untuk menghindari pajak antara lain adalah Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) atau seringnya disebut penggelapan pajak, yaitu usaha untuk mengurangi beban pajak, namun dengan menggunakan cara yang melanggar undang-undang (ilegal) seperti memanipulasi laporan keuangan dengan memperbesar biaya dengan cara fiktif

atau tidak melaporkan sebagian penjualan perusahaan. Karena bertentangan dengan undang-undang perpajakan, pemerintah tentunya akan memberikan sanksi atas tindakan pelanggaran dengan menyelundupkan pajak berupa sanksi baik secara administratif, maupun hukuman pidana. Sedangkan modus Penghematan Pajak (*Tax Saving*) adalah tindakan yang diambil wajib pajak untuk menghindari utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk yang terdapat pajak pertambahan nilainya. Dengan begitu, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, tindakan penghematan pajak aman bagi wajib pajak.

Perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) terletak pada aspek legalitas, dimana pada umumnya penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan manajemen pajak yang memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar peraturan perpajakan itu sendiri. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tindak pidana di bidang perpajakan secara ilegal dengan melanggar peraturan perpajakan. Dengan begitu, maka perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam perencanaan pajaknya dengan memilih melakukan upaya pengurangan pajak melalui modus penghindaran pajak karena dianggap tetap mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku, seperti memanfaatkan celah (*loopholes*) ketentuan perpajakan dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Tidak sedikit kasus penyimpangan pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak pada beberapa sektor usaha dan ekonomi ditemukan oleh pihak berwenang. Salah satu sektor yang dianggap rentan dan berpotensi tinggi melakukan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) sektor tambang adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Jadi, perusahaan pertambangan adalah sektor usaha yang fokus melakukan penggalian dan pengambilan dalam rangka upaya pencarian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (batubara, migas, mineral, panas bumi) berasal dari permukaan bumi, bawah permukaan bumi, dalam kulit bumi serta air, secara mekanis ataupun manual, yang berharga serta bernilai ekonomis.

Di Indonesia sendiri, perusahaan pada sektor energi dan tambang adalah salah satu sektor yang berpotensi menjadi andalan bagi negara untuk memperoleh pendapatan. Namun sayang, pengelolaan pada sektor pertambangan masih belum jelas dan transparan yang menyebabkan potensi pendapatan negara dari sektor pajak belum cukup baik dan optimal. Salah satu bentuk kurang transparannya perusahaan sektor pertambangan yaitu masih belum terbukanya pengelola sektor tambang. Hingga sampai saat ini, belum ada informasi yang pasti terkait *beneficial ownership* (BO) pada perusahaan sektor

minerba, migas dan tambangan. Pada umumnya BO diartikan sebagai individu atau kelompok individu yang mengendalikan industri atau perusahaan pertambangan, walaupun tidak harus mencantumkan namanya pada dokumen resmi perusahaan. Padahal, sangat penting bagi pemerintah untuk mengetahui tentang siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang untuk mencegah korupsi dan penghindaran pajak atau kecurangan lainnya. Faktanya, tidak sedikit BO perusahaan menjadi penerima dan penikmat hasil dari adanya suatu perusahaan tambang. Bahkan terdapat beberapa alasan yang memperkuat kenapa pengungkapan BO pada sektor pertambang sangatlah penting.

Alasan pertama, sektor usaha pada pertambangan di Indonesia berpotensi besar namun kurang memberikan kontribusi pendapatan bagi negara. Jumlah realisasi pajak pada sektor minerba dan migas pada tahun 2014 terhitung sebesar Rp. 96,9 triliun. Sedangkan data dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun tersebut jumlah uang yang beredar pada sektor minerba dan migas sebesar Rp. 1.387 triliun, artinya jumlah realisasi pajak pada tahun 2014 hanya sebesar 9,4%. Kedua, pada tahun 2016 data yang diambil dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dari 11 ribu daintaranya terdapat 3.722 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. Terjadinya permasalahan izin tambang karena tata kelola tambang yang buruk, sehingga menyebabkan timbulnya potensi penghindaran pajak dan korupsi. Ketiga, selain izin yang bermasalah ada pemilik IUP yang tidak memiliki informasi soal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan data dari Supervisi dan Koordinasi KPK diketahui terdapat sekitar 1.800

pemilik IUP yang NPWP nya tidak dapat teridentifikasi. Maryati Abdullah sebagai Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) menyatakan bahwa informasi terkait NPWP pemilik IUP yang tidak akurat menyebabkan hilangnya potensi pajak di sektor tambang. Apalagi, menurut laporan *Transparency Internasional* menunjukkan bahwa BO kerap memiliki kaitan dengan berbagai skandal korupsi yang besar. Terdapat indikasi bahwa BO menggunakan jaringan kompleks perusahaan dan badan hukum lainnya untuk mentransfer dana ilegal. Biasanya, mereka menggunakan layanan broker dan bank profesional untuk mentransfer atau menyembunyikan dana (Ahnier, 2017).

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian terkait perilaku penghindaran pajak sebagai variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen) yang bervariasi. Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak, seperti Darmawan & Sukartha (2014) dan Rani, Susetyo, dan Fuadah (2018) menemukan bahwa profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Pada penelitian Rinaldi & Cheisviyanny (2015) juga menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, & Raharjo dan (2016) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun pada

variabel komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang berkaitan dengan pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak diantaranya dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang mengatakan bahwa Komite Audit dan Kualitas Audit memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Rosalia dan Sapari (2017) yang menyimpulkan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Eksandy (2014) yang menemukan bahwa Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Dengan melihat dari hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan yang menyimpulkan hasil dari variabel independen sehingga untuk melakukan penelitian, peneliti memutuskan untuk mengambil beberapa variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti akan mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Febrianti (2017). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Puspita dan Febrianti (2017) terletak pada sampel penelitian, variabel independen dan periode pengamatan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Puspita dan Febrianti (2017) yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, *sales growth*, dan komposisi komisaris. Sedangkan pada penelitian ini peneliti mengambil dua variabel independen yang sama dari penelitian sebelumnya yaitu profitabilitas dan

leverage serta merubah tiga variabel lainnya dan menambah satu variabel yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit. Digantinya variabel tersebut dengan alasan bahwa telah banyak penelitian yang menggunakan variabel intensitas modal, *sales growth*, dan komposisi komisaris padahal faktor lain yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak masih banyak. Sehingga peneliti menambahkan variabel kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit yang belum banyak dilakukan penelitian lain. Alasan yang lain, karena Puspita dan Febrianti (2017) menyarankan untuk menggunakan variabel kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit. Penelitian Puspita dan Febrianti (2017) menggunakan sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai 2014. Sedangkan pada penelitian ini peneliti mengambil sampel dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2019. Pertimbangan penulis untuk memilih perusahaan pertambangan adalah karena berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang rawan melakukan praktik penghindaran pajak (Novriansa, 2019). KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka, penelitian ini berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yang dapat diteliti dari penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap terjadinya perilaku penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap terjadinya terhadap perilaku penghindaran pajak?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap terjadinya perilaku penghindaran pajak?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terjadinya terhadap perilaku penghindaran pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dilakukannya penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap potensi terjadinya perilaku penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap terjadinya perilaku penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap terjadinya perilaku penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap potensi terjadinya perilaku penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap terjadinya perilaku penghindaran perusahaan.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap terjadinya perilaku penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan mampu untuk memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak bagi pihak perusahaan. Juga memberikan pengetahuan tentang adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kedepannya pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara diharapkan dapat menentukan kebijakan yang terbaik, khususnya dari sektor pajak serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi praktik penghindaran pajak.

3. Manfaat Bagi Calon Investor

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu investor dalam menganalisis pilihan investasinya dalam sebuah perusahaan dengan memperhatikan tindak penghindaran pajak sehingga investor lebih bijaksana dalam melakukan investasi.

4. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini akan memberikan bukti empiris atas pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Juga mampu untuk berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

5. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terkat ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk mendasari penelitian, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai penjelasan terkait dengan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Pada bagian ini diuraikan mengenai populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data penelitian, definisi serta pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini ini berisi mengenai penjelasan terkait dengan deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif pada masing- masing variabel, menyajikan hasil olah data, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan serta saran berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan atau yang sering disebut dengan *agency theory* adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan antara 2 hubungan pihak kerja yang ada di dalam sebuah perusahaan. Pihak tersebut adalah agen dan prinsipal, dimana agen (manajemen) yang ada di dalam sebuah perusahaan adalah agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal) yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola sebuah perusahaan secara efektif dan efisien. Sedangkan prinsipal adalah pemegang saham yang ada di dalam sebuah perusahaan. Prinsipal di dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang besar dari investasi yang mereka lakukan di perusahaan tersebut dan berharap manajer dapat melakukannya. Sedangkan agen dalam hal ini manajer memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pemberian penghargaan yang diberikan oleh investor atas kontribusi yang diberikan oleh manajer. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh investor dapat berupa bonus. Oleh karena itulah manajer akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan reward yang diberikan oleh investor.

Sebagai pengelola perusahaan, manajer memiliki akses atas segala informasi terkait perusahaan. Artinya manajer sebagai agen mengetahui kondisi sesungguhnya suatu perusahaan. Sedangkan pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai prinsipal bila dibandingkan dengan manajer hanya memiliki sedikit informasi terkait perusahaan karena keterbatasan dalam mengakses informasi perusahaan. Keadaan tersebut dikenal sebagai *asymmetric information*. Dampak munculnya *asymmetric information* menyebabkan manajer sebagai agen ingin memanfaatkan keadaan tersebut melalui tindakan oportunistik dengan mementingkan diri sendiri (*opportunistic behaviour*) (Rahmawati, Topowijono dan Sri, 2015). Dalam teori keagenan menganggap setiap individu akan bertindak demi kesejahteraannya sendiri termasuk manajer. Dimana manajer sebagai agen akan mengambil tindakan oportunistik untuk keuntungan mereka sendiri melalui cara memanipulasi laporan keuangan agar laba perusahaan terlihat semaksimal mungkin dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam mengelola perusahaan.

Pernyataan diatas didukung oleh pendapat Ary (2011) yang menyatakan bahwa, hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen dapat menimbulkan risiko keagenan disuatu perusahaan. Risiko ini terjadi ketika pemilik perusahaan (pemegang saham) berharap kepada manajer agar dapat melakukan pengambilan keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan namun, manajer malah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik dikarenakan manajer

terdorong oleh keinginan-keinginan tertentu untuk melakukan tindakan oportunistik yaitu tindakan untuk mementingkan dirinya sendiri. Karena mementingkan dirinya sendiri, manajer akan melakukan perencanaan laba sehingga labanya dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan keinginan yang mendasari tindakan tersebut. Sehingga dimata pemilik perusahaan akan melihat bahwa kinerja manajer telah bagus dan manajer mendapatkan reward yang diberikan oleh pemilik perusahaan karena kinerjanya tersebut. Jika dilihat dari perspektif perpajakan, tindakan yang dilakukan manajer tersebut dapat mempengaruhi jumlah pajak perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dengan dilakukannya tindakan manajer tersebut dapat mengarah pada praktek penghindaran pajak.

2. Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning atau yang biasa disebut perencanaan pajak adalah suatu proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi tidak sampai melanggar peraturan perpajakan. Suandy (2008) menjelaskan bahwa, perencanaan pajak berfungsi sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga hutang pajak yang ditagih berupa pajak penghasilan (PPh) maupun beban pajak lainnya seminimal mungkin, sepanjang tidak keluar dari undang-undang dan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) juga disebut dengan istilah perlindungan pajak (*tax sheltering*), yaitu metode untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang mengakibatkan pengurangan pembayaran kepada entitas

penagih pajak, yang berarti sebagai proses memanipulasi transaksi dan usaha wajib pajak agar pajak yang dibebankan berada dalam jumlah yang seminimal mungkin tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2008).

Berbagai perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dibebankan pada perusahaan. Agar memperoleh keringanan pajak, perusahaan berupaya merencanakan pajak sebaik mungkin. Wijaya dan Martani (2011) menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik cenderung akan mengurangi laba bersih perusahaan. Untuk mengurangi laba pada saat sebelum terjadi penurunan pajak, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang baik apabila telah menetapkan penurunan tarif pajaknya. Perencanaan pajak menjadi bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal pada saat melakukan manajemen pajak. Langkah awal dalam manajemen pajak yaitu menseleksi jenis tindakan penghematan pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan.

Lumbantoruan (1996) menjelaskan, untuk meminimalkan beban pajak terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak yaitu:

- a. Penggeseran pajak (*tax shifting*), adalah pergeseran atau pemindahan atau mentransfer beban pajak baik ke depan (*forward shifting*) atau ke belakang (*backward shifting*) dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan kata lain, dimungkinkan orang atau badan yang dikenakan pajak

tidak menanggung beban pajaknya karena beban pajaknya telah dipindahkan kepada pihak lain.

- b. Transformasi, merupakan upaya perusahaan biasanya manufaktur yg dilakukan untuk menghindari pajak dengan menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasa dilakukan untuk mencegah menurunnya harga pasar karena kenaikan harga jual.
- c. Kapitalisasi, merupakan harga objek pajak yang dikurangkan besarnya hingga sama dengan jumlah pajak yang kemudian oleh pihak pembeli akan dibayarkan.
- d. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), merupakan upaya wajib pajak dengan menggunakan alternatif praktis untuk meminimalkan beban pajak yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, berbeda dengan penggelapan pajak yang berada di luar bingkai peraturan perpajakan.
- e. Penggelapan pajak (*tax evasion*), merupakan rencana penghindaran pajak yang terutang dimana wajib pajak berniat membayar dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (illegal), seperti memanipulasi laporan keuangan dengan tidak melaporkan sebagian penjualan, sehingga mengurangi jumlah sebenarnya pajak terutang.

Selain cara yang sudah disebutkan diatas, masih ada cara lain untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan *tax saving* atau yang biasa disebut penghematan pajak. Zain (2008) menjelaskan, penghematan pajak merupakan suatu cara untuk mengefisienkan utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti dengan sengaja mengurangi pekerjaan atau jam

kerja agar penghasilannya terlihat menjadi lebih kecil dan dapat terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) penghindaran pajak adalah suatu upaya sering dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi beban pajaknya, sepanjang tidak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun tindakan penghindaran pajak tidak dianggap melawan hukum, namun tindakan tersebut tetap dapat merugikan negara dalam pemungutan pajak. Pemerintah bisa saja menunjuk perusahaan yang mengelak pajak, namun pemerintah tidak memiliki bukti apabila perusahaan tersebut melanggar ketentuan pajak, sehingga pemerintah tidak dapat mengambil tindakan. Selain itu, menurut Pradipta dan Supriyadi (2015) perilaku penghindaran pajak apabila telah menjurus ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan denda.

Pada dasarnya, strategi dalam pengurangan pembayaran pajak terdapat dua pendekatan, yaitu dengan memperbesar beban perusahaan atau memperkecil pendapatan. Strategi pengurangan pembayaran pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan tanpa melanggar undang-undang (legal) perpajakan adalah dengan memanfaatkan adanya celah (*loopholes*) di dalam peraturan perpajakan dan *grey area* untuk dapat memperkecil pajak yang akan dibayarkan. Istilah *loopholes* merupakan istilah pada *tax planning* yang berarti celah atau peluang untuk menyiasati suatu peraturan agar

mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut. Sedangkan *grey area* pada perpajakan adalah wilayah yang peraturan pajaknya tidak jelas atau tidak lengkap atau tidak diatur tertulis mana yang boleh dan tidak boleh.

Selanjutnya, strategi penghindaran pajak dengan memperbesar beban perusahaan tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 dengan memanfaatkan beberapa akun beban atau biaya yang bisa digunakan untuk meminimalkan pajak, biasanya dengan menjual obligasi atau berhutang kepada perusahaan induk dan melunasi kembali angsuran dengan bunga yang tinggi. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan kompensasi kerugian pajak untuk meminimalkan tagihan pajak perusahaan pada periode selanjutnya. Selanjutnya membeli bahan baku dari perusahaan satu grup dengan harga yang tinggi yang berdiri di negara dengan tarif pajak yang rendah, atau memindahkan domisili atau lokasi usaha dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke yang rendah.

Rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia dapat menggambarkan fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Rasio pajak pada suatu negara mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dalam bentuk pajak dan memungut pajak pendapatan dari masyarakat. Semakin baik kinerja pemerintah dalam memungut pajak, maka semakin tinggi rasio pajak pada suatu negara. Berikut beberapa pengukuran yang dapat dilakukan untuk menghitung

seberapa besar suatu perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak, antara lain:

a. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

CETR merupakan tarif pajak efektif kas yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi tingkat perusahaan melakukan agresivitas perencanaan pajak dengan menggunakan perbedaan temporer maupun perbedaan tetap (Budiman & Setiyono, 2012). CETR dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kas yang dibayarkan perusahaan untuk pajak dan laba sebelum pajak.

b. *Effective Tax Rate (ETR)*

ETR adalah salah satu acuan dalam penetapan kebijakan sistem perpajakan perusahaan dengan laporan laba rugi yang menjadi basis pengukurannya. ETR mampu menghitung efektifitas dari strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Selain itu, perusahaan menganggap apabila menggunakan ETR mampu menggambarkan perbedaan yang tetap antara laba fiskal dengan perhitungan laba buku. ETR dirumuskan dengan membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak.

c. *Book-Tax Difference (BTD)*

BTD merupakan gambaran selisih antara total laba yang dihitung dengan dasar akuntansi atau laba komersial dengan laba yang

dihitung berdasarkan peraturan perpajakan atau laba fiskal (Sartika, 2015). Umumnya apabila di perusahaan menunjukkan semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi maka, diindikasikan perusahaan semakin agresif dalam meminimalkan pembayaran pajak. Alasan timbulnya BDT dikarenakan didalam perusahaan terdapat aktivitas manajemen laba dan perencanaan pajak.

Dari ketiga pengukuran tersebut, pengguna laporan keuangan diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengetahui apakah terdapat tindakan penghindaran pajak atau tidak pada suatu perusahaan. Meskipun tindakan perusahaan untuk menghindari pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, namun dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara.

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kinerja pada perusahaan. Menurut Maharani & Suardana (2014), profitabilitas dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan menghasilkan laba pada beberapa periode tertentu dari tingkat asset, modal saham tertentu dan penjualan. Rasio profitabilitas juga mampu menggambarkan tingkat efektivitas kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Rasio profitabilitas yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba semakin baik. Untuk menghitung rasio profitabilitas dapat dengan

membandingkan antara komponen-komponen yang terdapat pada laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca.

Salah satu proksi profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA), ROA adalah proksi yang digunakan untuk mengukur persentase laba yang mampu diperoleh perusahaan dari penggunaan total aset atau seluruh sumber daya yang dimiliki. Rasio ROA juga dapat menilai kinerja dan efisiensi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pengelolaan aset yang dimilikinya. Besarnya nilai ROA dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Apabila nilai ROA pada suatu perusahaan semakin tinggi berarti profitabilitas yang diperoleh perusahaan juga semakin tinggi. Tingginya profitabilitas pada suatu perusahaan akan memberikan kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak dengan matang sehingga perusahaan dapat seminimal mungkin membayar pajaknya.

Rasio ROA dapat dihitung dengan membandingkan antara laba yang telah dikurangi pajak dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Selain ROA terdapat beberapa proksi lain untuk mengukur profitabilitas, antara lain:

a. *Gross Profit Margin* (GPM)

GPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perhitungan biaya produksi atau harga pokok. Rasio GPM diukur

dengan membandingkan antara nilai persentase laba kotor dengan penjualan atau pendapatan yang dihasilkan. Apabila GPM semakin besar maka semakin efisien kegiatan operasional suatu perusahaan. GPM dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Net Profit Margin (NPM)*

NPM merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur tipis atau tebal-nya laba bersih setelah pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Nilai rasio NPM yang tinggi menggambarkan perusahaan beroperasi dengan baik. Rasio NPM diukur dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan, seperti berikut ini:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Return on Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio probabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan pemegang saham pada perusahaan tersebut. Rasio ROE dapat menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*). Karena itu, semakin tinggi nilai ROE pada suatu perusahaan, akan meningkatkan minat dan kepercayaan investor untuk berinvestasi. ROE dapat dihitung

dengan membandingkan antara penghasilan perusahaan setelah dikurangi pajak (*earnings after tax*) dengan total modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

d. Return on Investment (ROI)

ROI merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil dari jumlah seluruh aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Nilai ROI mampu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas penjualan terhadap jumlah aset yang tersedia pada perusahaan secara keseluruhan. Artinya, semakin tinggi nilai ROI maka semakin baik kondisi suatu perusahaan. ROI dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. Rumus ROI yaitu sebagai berikut:

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

e. *Earning Per Share* (EPS)

EPS merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari per lembar saham yang beredar. Nilai EPS menggambarkan jumlah uang yang akan diperoleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya saat pembagian keuntungan saham yang beredar pada akhir tahun. Karena EPS merupakan

indikator keberhasilan pada perusahaan, manajemen dan pemegang saham perusahaan berusaha keras untuk meningkatkan nilai EPS. Rumus *earning per share* yaitu sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

5. Ukuran Perusahaan

Menurut Saifudin & Yunanda (2016), ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dengan melihat berdasarkan dari nilai total aset, penjualan, ekuitas, jumlah karyawan dan lainnya. Artinya semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan perusahaan, karena besar kecilnya total aset pada suatu perusahaan akan menentukan jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Perusahaan dengan aset besar akan menghasilkan laba tinggi dapat memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Nicodeme (2007) dalam Dharma & Ardiana (2016) menjelaskan, perusahaan besar biasanya dalam mengelola beban pajaknya akan lebih mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi. Karena perusahaan yang tergolong dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan skala lebih kecil untuk mengelola beban pajaknya. Dalam pengelolaan pajak perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan supaya perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajaknya. Karena

perusahaan dianggap termasuk sebagai wajib pajak, maka ukuran perusahaan menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak, karena mampu mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam membayarkan beban pajaknya (Dewinta & Setiawan, 2016).

6. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Rasio *leverage* sangat penting bagi kreditur atau calon kreditur. Pada umumnya kreditur atau calon kreditur memerlukan informasi berapa dana pemegang saham sebagai dasar menentukan tingkat keamanan kreditur. Rasio *leverage* yang tinggi mampu memberikan keraguan pada investor mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha dimasa depan. Alasannya karena dana untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan akan semakin berkurang sebab sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk memenuhi kewajibannya.

Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan pembiayaan aset nya lebih bergantung kepada utang. Akan tetapi, utang tersebut menyebabkan timbulnya beban bunga atas

pinjaman dari hutang yang termasuk beban tetap (*fixed rate of return*). Munculnya beban bunga atas pinjaman menyebabkan berkurangnya pendapatan kena pajak dan berpotensi menyebabkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini terjadi dikarenakan beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada (Surbakti, 2012).

Rasio *leverage* dapat dihitung menggunakan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR). DAR adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana aset perusahaan mampu menutupi utang. DAR digunakan untuk mengukur total aset yang dibiayai oleh utang pada perusahaan. Rasio DAR diukur dengan membandingkan antara utang jangka panjang dan utang jangka pendek dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dana yang dimiliki perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang maupun jangka pendek. Apabila semakin kecil nilai DAR maka menunjukkan bahwa semakin aman (*solvable*) kondisi keuangan suatu perusahaan. DAR dihitung menggunakan rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Selain DAR ada beberapa proksi yang dapat digunakan untuk menghitung *leverage*, antara lain:

a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur suatu investasi yang terdapat di perusahaan dengan membandingkan

antara seluruh kewajiban dengan total ekuitas. Nilai *leverage* yang semakin tinggi menandakan bahwa semakin kecil modal yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan utang yang harus dibayar. Artinya bila nilai *leverage* semakin rendah maka kondisi keuangan perusahaan semakin baik, karena alokasi hutang terhadap modal semakin rendah. *Leverage* dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

b. *Times Interest Earned Ratio* (TIER)

TIER adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa yang akan datang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan beban bunga. Rumus TIER yaitu sebagai berikut:

$$TIER = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

7. Komite Audit

Komite Audit merupakan sekumpulan orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) yang dipilih dari anggota dewan komisaris. Dalam *Good Corporate Governance* (GCG), komite audit memiliki peran penting sebagai salah satu komponen perusahaan yang mutlak harus ada. Menurut Surya & Yustiavandana (2006) dibentuknya komite audit ini

oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan serta melakukan penelitian atau pemeriksaan yang dianggap penting terhadap pelaksanaan fungsi direksi pada pelaksanaan tata kelola perusahaan. Karena tugas tersebut, anggota komite audit dituntut untuk memiliki keahlian yang memadai. Agar dapat dapat melaksanakan tugasnya, komite audit diberikan kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP103/MBU/2002 dan Surat Edaran Bapepam Nomor SE03/PM/2002 yang mengatur tentang keberadaan komite audit menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang beranggotakan minimal tiga orang yang terdiri dari 1 ketua yang berasal dari komisaris independen dan 2 anggota independen. Dibentuknya komite audit oleh dewan komisaris bertujuan untuk membantu melaksanakan tugas evaluasi, supervisi dan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dan audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Susanto (2013) menjelaskan bahwa komite audit dianggap sebagai mekanisme monitoring yang mampu meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Agar suatu laporan keuangan dapat dipercaya, dewan perusahaan menyerahkan tanggung jawab nya pada komite audit apabila terjadi kesalahan terhadap pelaporan keuangan. Karena itu, mekanisme memonitoring komite audit mampu memperbaiki kualitas

informasi bagi manajemen dan pemegang saham perusahaan, karena level informasi yang dimiliki kedua belah pihak tersebut berbeda.

Berdasarkan penelitian Oktofian (2015), menyebutkan bahwa komite audit bertanggung jawab terhadap tiga bidang, yaitu:

a. Pelaporan Keuangan (*financial reporting*)

Komite audit bertanggung jawab dalam bidang pelaporan keuangan untuk memastikan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah berisi informasi yang sebenarnya terkait hasil usaha, kondisi keuangan, komitmen dan rencana perusahaan.

b. Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*)

Komite audit bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan telah berjalan sesuai peraturan, etika dan undang-undang yang berlaku, termasuk telah melaksanakan pengawasan secara efektif apabila terjadi kecurangan dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

c. Pengawasan perusahaan (*corporate control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan dan memonitor sistem pengendalian internal perusahaan termasuk hal-hal yang didalamnya berpotensi terdapat resiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

8. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan (*probability*) yang dapat terjadi saat laporan keuangan klien diaudit oleh auditor dan ditemukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana auditor dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Dewi & Jati, 2014). Hal terpenting dalam melaksanakan pengauditan adalah transparansi yang menjadi salah satu elemen dari *good corporate governance* (GCG). Sartori (2010) menjelaskan, transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan pada pertemuan para pemegang saham dan pasar modal. Otoritas publik semakin menuntut atas peningkatan transparansi terkait hal pajak terhadap pemegang saham. Untuk melakukan pengukuran kualitas audit terhadap penilaian transparansi dapat menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Menurut beberapa referensi, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP Big Four (Price Water House Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP Big Four (Annisa & Kurniasih, 2008). Karena perusahaan yang auditnya semakin berkualitas akan minim

kecenderungan manipulasi laporan keuangannya yang biasanya dilakukan demi mengurangi beban pajak oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi kualitas audit akan semakin rendah peluang perusahaan untuk melakukan kecurangan penghindaran pajak.

9. Kepemilikan Institusional

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2017), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta insitusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Tanggung jawab kepemilikan institusional dalam perusahaan adalah memastikan bahwa manajemen telah membuat keputusan yang tepat demi memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Keberadaan pemilik institusional sangatlah penting karena, berfungsi memonitor secara efektif setiap keputusan yang diambil oleh manajemen agar kinerjanya lebih optimal. Karena itu, semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan mampu menyebabkan bertambahnya tingkat pengawasan terhadap manajemen.

Ariawan dan Setiawan (2017) menyebutkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan mampu meningkatkan kecenderungan dalam melakukan tindakan

penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalkan beban pajaknya, sehingga meningkatkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pelaporan pajak. Isnanta (2008) dalam Winata (2014), menjelaskan terjadinya hal ini karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan dianggap belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap yang memenuhi kepentingan pribadinya. Karena kurangnya kontrol yang baik inilah kepentingan institusional dapat menyebabkan konflik kepentingan anatar manajemen, sehingga timbul masalah keagenan dan memberikan peluang terjadinya penghindaran pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia” menguji pengaruh komposisi komisaris independen, *sales growth*, intensitas modal, *leverage*, *return on asset* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI dengan periode penelitian dari 2012 hingga 2014. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *sales growth*, *return on asset* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan komposisi komisaris independen, intensitas modal dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Eksandy (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian tersebut menggunakan 3 variabel independen yaitu komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Variabel dependennya adalah Penghindaran Pajak yang diukur dengan cash effective tax rate (CETR). Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri barang konsumsi periode 2010-2014 dengan metode purposive sampling dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berikutnya penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013”. Ada 6 variabel independen pada penelitian yaitu kepemilikan institusional, jumlah komite audit, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Dengan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependennya yang diuji menggunakan analisis regresi berganda. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan go listing

publik di Bursa Efek selama periode 2011 – 2013. Hasil penelitian ini dari uji keenam variabel independen, variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dewan Independen dan komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Darmawan dan Sukartha (2014) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Corporate Governance , *Leverage* , *Return On Assets* , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, *Return On Assets*, *Leverage* dan Penerapan *Corporate Governance*. Lalu variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak yang diukur dengan selisih antara laba komersial dengan laba fiskal kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara *Corporate Governance*, *Return On Asset*, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel *Leverage* dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan Asri dan Suardana (2016) dengan judul “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak” menggunakan 4 variabel independen yaitu Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan. Dengan

Penghindaran Pajak sebagai variabel dependennya yang dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan Puspita dan Febrianti (2017) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, Return On Asset, Leverage, Intensitas Modal, Sales Growth, dan Komposisi Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependennya. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini menggunakan model regresi berganda. penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI pada periode 2012 hingga 2014. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini bahwa *sales growth*, ukuran perusahaan dan *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komposisi komisaris independen, intensitas modal dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Puspita & Febrianti (2017)	“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”	<p><u>Variabel Independen:</u> Ukuran Perusahaan, <i>Return On Asset, Leverage, Intensitas Modal, Sales Growth</i> dan Komposisi Komisaris Independen</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p>	Variabel <i>Sales Growth, Return On Asset</i> dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan komposisi komisaris independen, <i>Intensitas Modal</i> dan <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Eksandy (2014)	“Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak”	<p><u>Variabel Independen:</u> Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit.</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p>	Variabel komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan

				terhadap penghindaran pajak.
3	(Cahyono et al., 2016)	“Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013”	<p><u>Variabel Independen:</u> Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit,</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Tindakan Penghindaran Pajak</p>	Dari pengujian keenam variabel, didapatkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel profitabilitas, <i>leverage</i> , komite audit, ukuran perusahaan dan dewan Independen yang tidak mempengaruhi penghindaran pajak.
4	Darmawan & Sukartha, (2014)	“Pengaruh Penerapan Corporate Governance , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”	<p><u>Variabel Independen:</u> <i>Corporate Governance</i>, <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , Dan Ukuran Perusahaan.</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p>	Terdapat pengaruh antara variabel <i>Corporate Governance</i> , <i>Return On Asset</i> , dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel <i>Leverage</i> dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.

5	Asri & Suardana (2016)	“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Ekseutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”	<p><u>Variabel Independen:</u> Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Ekseutif dan Ukuran Perusahaan.</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p>	Keberadaan variabel komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
6	Puspita & Febrianti (2017)	“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”	<p><u>Variabel Independen:</u> ukuran perusahaan, Return On Asset, Leverage, Intensitas Modal, Sales Growth, dan Komposisi Komisaris Independen.</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p>	Variabel <i>sales growth return on asset</i> dan ukuran perusahaan, berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komposisi komisaris independen, intensitas modal dan <i>leverage</i> tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nilai profitabilitas pada suatu perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat asset, penjualan dan modal saham. Artinya semakin tinggi nilai profitabilitas menandakan bahwa semakin tinggi juga laba yang diperoleh perusahaan. Sedangkan pengenaan pajak terutang berdasarkan jumlah penghasilan neto perusahaan yang merupakan ketentuan tarif pajak atas penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dengan kemampuan memperoleh laba yang tinggi juga akan membayar pajak yang tinggi. Beban pajak yang tinggi dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak, karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak dengan matang sehingga pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin. Artinya, semakin tinggi profitabilitas akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Profitabilitas dapat diukur menggunakan beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan suatu indikator yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, perusahaan yang mampu meraih nilai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut dianggap

memiliki performa keuangan yang baik. Untuk wajib pajak badan, nilai ROA dapat dilihat dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan laba bersih perusahaan. ROA juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang telah diinvestasikan dari semua aktiva untuk menghasilkan laba.

Menurut Chen *at al.* (2010) dalam Kurniasih & Ratna Sari (2013) bahwa perusahaan menghasilkan laba yang semakin tinggi maka akan semakin tinggi juga nilai ROA nya, maka profitabilitas perusahaan juga semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih berkesempatan untuk merencanakan pembayaran pajaknya (*tax planning*) dari pada perusahaan dengan profitabilitas yang rendah, karena semakin tinggi laba yang diperoleh maka beban pajak yang ditagihkan ke perusahaan juga semakin tinggi. Adanya perencanaan pajak (*tax planning*) membuat manajemen keuangan berupaya untuk mengelola pengeluaran pajak yang ditanggung perusahaan seminimal mungkin namun tetap dengan mempertahankan profitabilitas agar tetap tinggi dan stabil. Karena perencanaan pajak yang dilakukan manajemen keuangan tersebut memungkinkan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak. Sehingga profitabilitas yang semakin tinggi akan cenderung meningkatkan upaya perusahaan dalam penghindaran pajak.

Uraian diatas didukung oleh hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015) yang

keduanya menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga beban pajak yang diterima perusahaan akan semakin tinggi, dengan begitu memberikan kesempatan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), Dewi & Noviani (2017) dan Putri & Putra (2017) mengatakan, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dan stabil cenderung didukung oleh manajemen keuangan yang baik. Dengan begitu, semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Menurut Puspita dan Febrianti (2017) ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang antara lain ditunjukkan dari total penjualan, total aset, ekuitas, jumlah karyawan dan lainnya. Berdasarkan ukuran perusahaan, suatu perusahaan umumnya dikategorikan sebagai perusahaan besar atau kecil dengan melihat berdasarkan nilai pasar saham atau total asset perusahaan. Masyarakat cenderung lebih mengenal perusahaan dengan skala yang besar sehingga informasi terkait suatu perusahaan juga lebih

mudah diperoleh investor. Kebanyakan investor biasanya lebih menyukai berinvestasi pada perusahaan dengan skala yang besar, karena demi mengharapkan pengembalian investasi yang lebih besar dan menghindari resiko ketidakpastian.

Perusahaan tergolong sebagai salah satu wajib pajak berupa badan, jadi besar kecilnya ukuran perusahaan dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam membayar beban pajaknya. Darmawan & Sukartha (2014) dan Singly & Sukartha (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa, perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki sumber daya yang berlimpah. Sehingga manajer dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk kegiatan operasional guna meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan begitu perusahaan yang dikategorikan dalam skala lebih besar dinilai dalam menghasilkan laba nya lebih baik dibanding perusahaan yang berskala kecil. Artinya, ukuran perusahaan yang semakin besar dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Disisi lain, perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi akan didampangi dengan timbulnya beban pajak yang tinggi. Oleh karena itu, agar terhindar dari beban pajak yang tinggi, perusahaan berskala besar akan cenderung berupaya menghindari pajak untuk mencegah pengeluaran yang besar.

Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Ardiana (2016), Dewinta & Setiawan (2016), A. Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), Puspita & Febrianti (2017) serta Azizah dan Kumalasari (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan

besar cenderung lebih stabil dalam menghasilkan laba berdasarkan sumber daya yang dimilikinya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar besar memiliki sumberdaya manusia yang ahli di bidang perpajakan, sehingga perusahaan besar lebih mampu melakukan perencanaan pajak yang optimal untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Dalam arti lain menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula aktivitas penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi atas penggunaan jumlah utang yang dipergunakan untuk membiayai investasinya dan memperoleh sumber dana perusahaan (Agusti, 2013). Gemilang (2017) menyatakan bahwa perusahaan memperoleh sumber pendanaan berasal dari pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Berdasarkan *Pecking Order Theory* dikatakan bahwa pendanaan yang bersumber dari internal lebih diutamakan oleh perusahaan. Sedangkan pendanaan eksternal dibutuhkan ketika dana internal dianggap tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan. Pendanaan eksternal dapat berasal dari berbagai macam sumber dan bentuk, namun perusahaan lebih menyukai dana eksternal dalam bentuk hutang. Alasannya karena

dengan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan akan mendatangkan beban bunga (*debt interest*) yang harus dibayar. Timbulnya beban bunga menyebabkan berkurangnya laba sebelum kena pajak. Berkurangnya laba sebelum kena pajak mengakibatkan berkurangnya pajak yang dibebankan terhadap perusahaan. Apabila hal ini terjadi maka perusahaan yang menunjukkan beban bunga yang tinggi, semakin kecil kemungkinan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi leverage maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Salah satu proksi untuk menghitung *leverage* yaitu *debt to equity ratio* (DER). Nilai DER menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya menggunakan modal sendiri dengan membandingkan antara seluruh kewajibannya dengan total aset atau ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) dalam penelitian Luke & Zulaikha (2016) mengungkapkan DER memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak. Dengan begitu, semakin tinggi nilai leverage akan menunjukkan utang yang dimiliki perusahaan juga tinggi, tingginya hutang akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin rendah.

Pendapat di atas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013) Swingly & Sukartha

(2015), Dharma & Ardiana (2016), Lestari dan Putri (2017) Ngadiman & Puspitasari (2017), Dewi dan Noviani (2017) serta Ariawan & Setiawan (2017) dimana pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *leverage* yang diukur menggunakan DER menunjukkan hasil negatif. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio *leverage* akan diikuti biaya bunga yang semakin tinggi pula. Biaya bunga yang tinggi mengakibatkan berkurangnya laba yang dapat dihasilkan perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang. Perusahaan dengan beban pajak yang rendah lebih cenderung tidak melakukan upaya penghindaran pajak. Dalam arti lain, *leverage* yang semakin tinggi mengakibatkan tindakan perusahaan dalam menghindari pajaknya semakin rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Leverage berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite Audit adalah sekumpulan orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) yang dipilih dari anggota dewan komisaris. Dibentuknya komite audit oleh dewan komisaris bertujuan untuk membantu melaksanakan tugas penelitian dan pemeriksaan terkait pelaksanaan fungsi direksi dalam tata kelola perusahaan (KNKG, 2006). Dewan komisaris memberikan tanggung jawab kepada komite audit untuk mengawasi kinerja

perusahaan. Fungsi lain dari komite audit adalah sebagai penghubung antara auditor eksternal dengan perusahaan

Komite audit berkaitan erat dengan pemeriksaan terhadap ketaatan terhadap peraturan dan juga resiko yang dihadapi perusahaan. Karena adanya komite audit sebagai pengawas segala kegiatan operasional di dalam perusahaan, sehingga perusahaan dengan komite audit lebih dipercaya bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan (Rosalia dan Sapari, 2017). Menurut Siallagan & Machfoedz (2006), dengan adanya komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak yang diambil perusahaan akan semakin rendah, namun apabila semakin sedikit jumlah komite audit maka kemungkinan penghindaran pajak pada suatu perusahaan akan semakin tinggi.

Uraian diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan Kurniasih & Ratna Sari (2013), Winata (2014) N. N. K. Dewi & Jati (2014) serta Maharani dan Suardana (2014) yang ketiganya mengungkapkan bahwa komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan sehingga semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan maka pelaporan keuangannya akan lebih terbuka dan bertanggung jawab karena. Hasil yang sejalan juga terdapat pada

penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015), Cahyono et al. (2016), dan Rosalia & Sapari (2017) yang ketiga nya berpendapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Dengan begitu, semakin banyak anggota komite audit pada perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Maharani & Suardana (2014) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, lalu melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dalam proses audit harus dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional, berkompeten serta independen, tidak boleh dilaksanakan oleh sembarang orang agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Citra dari kantor akuntan publik sendiri dapat dipengaruhi oleh kualitas hasil audit nya, dimana audit yang berkualitas terkandung kejelasan informasi didalamnya terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor sesuai dengan standar auditing. Jika dikaitkan oleh pajak, kualitas audit dapat menjadi faktor yang mampu mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena kualitas audit merupakan indikator utama

dalam memilih auditor. Dalam memilih auditor bisa diukur dengan spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP spesialisasi industri memungkinkan perusahaan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang bukan spesialisasi industri karena dipercaya mampu mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Saat ini kualitas audit menjadi elemen penting dalam *Corporate Governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip transparansi, hal ini membuat publik semakin menuntut perusahaan agar transparan terhadap laporan keuangannya. Untuk mengukur kualitas audit dapat menggunakan proksi ukuran KAP. Audit laporan keuangan oleh KAP Big Four (Deloitte Touche, Tohmatsu, Price Water Cooper, Ernst & Young dan KPMG) dipercaya tingkat kecurangannya lebih rendah daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP yang bukan Big Four (Annisa & Kurniasih, 2008). Annisa dan Kurniasih (2008) juga menjelaskan, semakin berkualitas audit akan semakin rendah tingkat penghidaran pajaknya. Karena perusahaan yang auditnya semakin berkualitas akan minim melakukan tindakan manipulasi laporan keuangannya yang biasanya dilakukan demi mengurangi beban pajak oleh perusahaan

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Fadhilah (2014), Dewi dan Jati (2014) serta Maharani dan Suardana (2014) bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dipercaya minim berupaya menghindari pajak,

karena auditor dalam KAP Big Four lebih professional dan kompeten dibanding auditor yang bukan termasuk dalam KAP Big Four. Karena auditor pada KAP Big Four memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi adanya memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Khairunisa, Hapsari, dan Aminah (2017) Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_s: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

6. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi selain orang pribadi. Investor institusional dapat berasal dari badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Ary (2011) menjelaskan, dalam melakukan investasi investor harus memiliki kebijakan-kebijakan yang menggambarkan secara rinci tujuan dan batasan-batasan investasi. Investor harus dapat mengoptimalkan tujuannya dengan cara seksama memperhatikan kendala-kendala yang ada serta melakukan evaluasi secara periodik atas investasinya. Hal tersebut perlu dilakukan karena adanya perubahan terus menerus di pasar uang dan perpajakan, dimana faktor-faktor atau kejadian kejadian tersebut dapat mempengaruhi tujuan. Terdapat banyak kemungkinan bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dan sekaligus jumlah investasi. Investor harus secara rutin mengkaji dan bertanya kepada pihak manajemen apakah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang investor yang baik adalah yang mampu secara terus-menerus melakukan monitoring atas investasinya.

Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan menyebabkan pengaruh dari kepentingan lain yang ada didalam perusahaan seperti manajer, kreditur ataupun kepemilikan pemegang saham lainnya berkurang. Dibandingkan pemegang saham lainnya, kepemimpinan institusional memiliki pengawasan yang lebih kuat. Karena ketika dikaitkan dengan teori keagenan maka, apabila pada suatu perusahaan terdapat banyak investor institusional maka terdapat kendali yang besar berasal dari pihak institusional yang akhirnya menjadi pemilik saham mayoritas dengan mudah. Berdasarkan teori keagenan, seorang manajer mengelola laba untuk menciptakan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang dikelolanya. Manajer memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik, serta manajer memiliki hak untuk menerima penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Kenyataannya setiap pihak hanya berupaya memaksimalkan kesejahteraannya dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Pemilik selalu mendorong dan mendesak manajer untuk

bekerja lebih keras agar nilai perusahaannya dapat meningkat (Sulistiyanto, 2018).

Pada penelitian Okrayanti, Utomo dan Nuraina (2017), Rosalia dan Sapari (2017) dan Merslythalia dan Lasmana (2017) ketiganya menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusional maka semakin besar tekanan kepada pihak manajemen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, pihak investor institusional akan menetapkan kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan keuntungan seperti kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak, karena pajak merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mencapai keuntungan perusahaan. Uraian tersebut didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang dilakukan Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan, keberadaan investor institusional memberi tekanan kepada manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dalam memperoleh laba yang maksimal, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan.

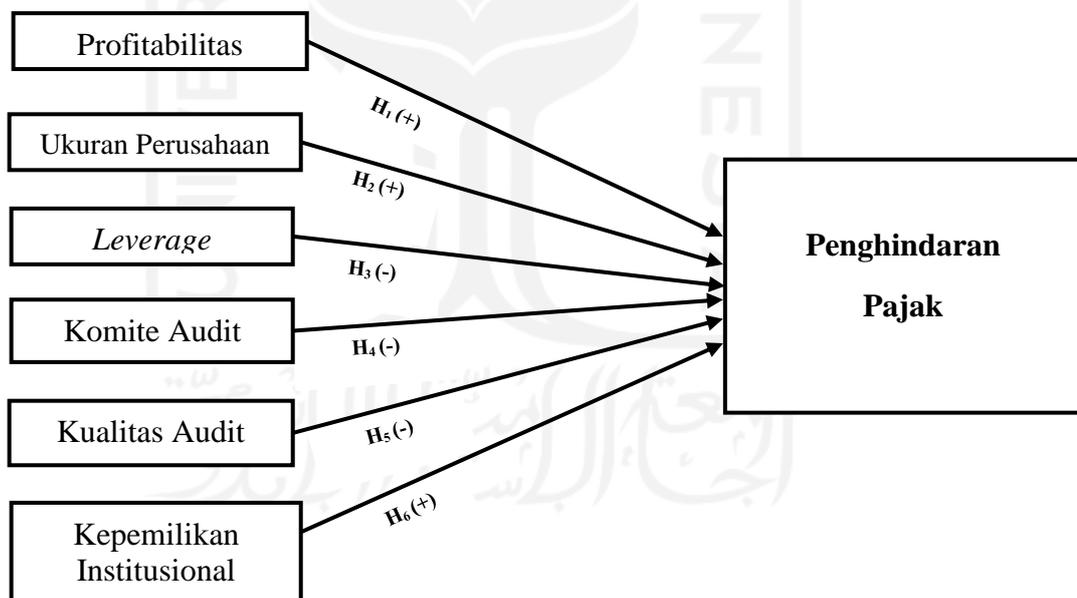
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Berikut merupakan kerangka penelitian yang menghubungkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana penulis menggunakan kriteria tertentu dalam pemilihan sampel. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia berturut-turut pada tahun 2015-2019.
2. Perusahaan tersebut tidak melakukan penghapusan pencatatan (*delisting*) dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019.
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan dapat diakses dari *website* perusahaan atau *website* Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019.
4. Perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah.
5. Perusahaan yang selalu memperoleh keuntungan selama tahun 2015-2019.

6. Laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut menyediakan data-data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu peneliti memperoleh data secara tidak langsung melalui perantara, seperti dokumen atau orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan mengakses web-web resmi perusahaan.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Peneliti menggunakan enam variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen) yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka berikut adalah definisi dari masing masing variabel yang terdapat pada penelitian ini:

1. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (X1), ukuran perusahaan (X2), *leverage* (X3), komite audit (X4), kualitas audit (X5) kepemilikan institusional (X6).

a. Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas adalah salah satu rasio untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang mampu mencerminkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba selama beberapa periode tertentu pada tingkat asset, penjualan dan modal saham tertentu. Untuk mengetahui nilai profitabilitas dapat menggunakan proksi *return on asset* (ROA). Profitabilitas yang dihitung menggunakan ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang terlepas dari pendanaan. Rasio ROA yang semakin tinggi maka kinerja perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba semakin baik. ROA diukur dengan rumus seperti berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

b. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan aset, total penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan (Puspita dan Febrianti, 2017). Dalam penelitian ini, ukuran

perusahaan diproksikan dengan total aset yang diukur menggunakan Log Natural Total Assets. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. Ukuran perusahaan diformulasikan sebagai berikut:

$$SIZE = \ln (\text{Total Asset})$$

c. *Leverage*

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Apabila nilai *leverage* pada suatu perusahaan tinggi menunjukkan perusahaan tersebut dalam membiayai asetnya lebih banyak bergantung pada hutang daripada modal. Hutang inilah yang akan menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak karena munculnya beban bunga atas pinjaman (Kurniasih dan Ratna Sari, 2013). Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah *debt to total asset ratio* (DAR) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

d. Komite Audit

Komite Audit adalah komite berfungsi mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan dan mengawasi tata

kelola pada suatu perusahaan yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Dibentuknya komite audit oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk membantu melakukan penelitian dan pemeriksaan terkait pelaksanaan fungsi direksi dalam tata kelola perusahaan. Mekanisme monitoring komite audit mampu mengoptimalkan fungsi audit untuk pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit pada setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pada penelitian ini untuk mengukur variabel komite audit menggunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit diukur dengan rumus:

$$KAD = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

e. **Kualitas Audit**

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang bisa terjadi ketika auditor menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi ketika mengaudit laporan keuangan klien lalu melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Pada penelitian ini variabel komite audit dihitung menggunakan pengukuran model Dummy seperti:

Dummy:

1 = KAP Big Four

0 = bukan KAP Big Four

f. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham yang kepemilikannya dimiliki oleh lembaga keuangan non bank seperti dana pensiun, asuransi, investasi, reksa dana dan lembaga keuangan lainnya dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain.

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kepemilikan institusional akan dinyatakan dalam persentase dan akan dilambangkan dengan INST dengan rumus sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi karena adanya variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah perilaku penghindaran pajak. Menurut Sumarsan (2015), penghindaran pajak adalah salah satu upaya yang sering dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajaknya, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR dihitung dengan membandingkan antara pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Apabila semakin rendah nilai CETR pada perusahaan, artinya semakin tinggi perusahaan

tersebut melakukan tindakan penghindaran. CETR diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap dependen yang diolah dengan menggunakan *software* program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Sebelum mengolah variabel-variabel menggunakan SPSS, dilakukan perhitungan data dengan menggunakan perhitungan matematis. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan suatu informasi mengenai gambaran suatu data yang terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif dapat memberikan deskripsi umum atau gambaran dari variabel penelitian terkait nilai yang sering muncul (modus), nilai tengah (median), nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif sangat penting bagi data sampel karena mampu menyajikan beberapa ukuran numerik dan menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah.

2. Uji Asumsi Klasik

Agar mendapatkan pengujian dengan hasil yang baik agar tidak melanggar asumsi klasik, maka harus menguji terlebih dahulu seluruh

data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan pengujian asumsi klasik untuk menguji dan mengetahui model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini apakah layak atau tidak. Agar sebuah data dikatakan layak digunakan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu data tersebut harus terdistribusi secara normal dan tidak mengandung autokorelasi, multikolonieritas serta heteroskedastisitas. Untuk itu, perlu terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam suatu model regresi memiliki distribusi normal atau tidak pada variabel dependen dan variabel independen maka dilakukan uji normalitas. Model regresi dianggap baik jika memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal karena akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Untuk uji normalitas pada penelitian ini, digunakan pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov.

Uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian statistik nonparametrik yang digunakan untuk menguji suatu data tersebut apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Ghozali (2013) menjelaskan, dalam pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov jika nilai *asymptotic significance* lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data variabel terdistribusi normal. Sedangkan apabila hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *asymptotic*

significance kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan data variabel tidak terdistribusi normal. Dalam pengujian statistik Kolmogorov–Smirnov dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Apabila probabilitas nilai Z uji Kolmogorov–Smirnov tidak signifikan kurang dari 0,05 secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- Apabila probabilitas nilai Z uji Kolmogorov–Smirnov signifikan lebih dari 0,05 secara statistik H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal. Uji Kolmogorov–Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_1 = Data residual tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinieritas

Untuk melakukan analisis regresi berganda dibutuhkan syarat uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik apabila diantara variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan multikolinieritas dalam persamaan regresi, dapat menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan toleransi variabel (*tolerance of variable*). Nilai toleransi variabel digunakan untuk mengukur variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel

independen lain. Oleh karena itu, nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah (karena $VIF = 1/\text{toleransi}$). Nilai *cut-off* biasanya digunakan untuk menunjukkan ketika tidak terdapat multikolinieritas apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Jika ada variabel yang terdeteksi terdapat multikolinieritas maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi dan tidak dapat ditoleransi agar memperoleh hasil yang tidak bias (Ghozali, 2013).

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengukur apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi. Ghozali (2013) menjelaskan apabila varian dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized. Analisis dasar heteroskedastisitas menurut Ghozali (2013) adalah:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (ber-gelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan cara melihat nilai signifikansi (Sig.) pada hasil SPSS, untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Apabila Sig. < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas namun jika Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Nachrowi dan Usman, 2008).

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear dalam penelitian terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Apabila terjadi korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Munculnya autokorelasi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu (*time series*) berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu, karena observasi atau sampel tertentu

cenderung dipengaruhi oleh sampel sebelumnya (Ghozali, 2013). Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan pengujian Durbin. Data dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi ketika nilai DurbinWatson (DW test) menunjukkan hasil $d_U < d < 4-d_U$. Berikut adalah kriteria pengambil keputusan dengan menggunakan nilai DurbinWatson:

Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson)

Jika	Hipotesis nol	Keputusan
$0 < d < d_L$	tidak ada autokorelasi positif	Ditolak
$d_L \leq d \leq d_U$	tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan
$4-d_L < d < 4$	tidak ada autokorelasi positif	Ditolak
$4-d_U \leq d \leq 4-d_L$	tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan
$d_U < d < 4-d_U$	tidak ada autokorelasi positif	Diterima

(Ghozali, 2013)

3. Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen, maka pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda dengan program aplikasi SPSS. Digunakannya analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh

profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam regresi berganda terkandung makna bahwa pada suatu persamaan regresi terdapat lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Teknik regresi linier berganda mampu memprediksi sejauh mana variabel dependen dapat dipengaruhi oleh nilai variabel independen. Untuk menguji hipotesis yang dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis tersebut akan diuji dengan rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{TAXAVO} = \alpha + \beta_1 \cdot \text{ROA} + \beta_2 \cdot \text{SIZE} + \beta_3 \cdot \text{DER} + \beta_4 \cdot \text{KomAud} + \beta_5 \cdot \text{KA} + \beta_6 \cdot \text{INST} + e$$

TAXAVO = Penghindaran Pajak (tax avoidance)

α = Koefisien konstanta

β_1-6 = Koefisien regresi variabel independen

ROA = Profitabilitas

SIZE = Ukuran Perusahaan

DER = Leverage

KomAud = Komite Audit

KA = Kualitas Audit

INST = Kepemilikan Institusional

e = error

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menentukan nilai aktual dapat diukur dengan pengujian *Goodness of Fit*. Secara statistik ketepatan fungsi tersebut dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, statistik t dan nilai statistik f. Jika nilai uji statistik berada di wilayah kritis (wilayah dimana H_0 ditolak), maka perhitungan statistik dapat dikatakan signifikan secara statistik. Sedangkan apabila nilai uji statistiknya berada di wilayah dimana H_0 diterima maka dikatakan tidak signifikan secara statistik (Ghozali, 2013).

4. Uji Hipotesis

Dari analisis regresi berganda selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan uji signifikansi F, koefisien determinasi dan uji statistik t.

a. Uji Signifikansi F

Digunakan nya pengujian statistik f untuk mengetahui apakah model regresi yang dipakai sudah layak untuk diuji. Apabila nilai Sig. F kurang dari α ($\alpha=5\%$) berarti model regresi lolos dari uji kelayakan model dan dinyatakan baik sebagai dasar analisis.

b. Uji Ketepatan Perkiraan (Koefisien Determinasi (R^2))

Digunakan nya koefisien determinasi untuk mengukur presentase seberapa besar variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Pengujian ini dilakukan hanya untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen ketika hasil uji Sig. F dalam analisis regresi menunjukkan nilai signifikan. Ghozali (2013)

menjelaskan, nilai R² yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R²) untuk jumlah variabel independen lebih dari dua.

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Digunakannya pengujian statistik t untuk mengukur secara individu pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Ketika t tabel lebih kecil dari t hitung yang diperoleh, artinya t hitung signifikan dengan kata lain hipotesis diterima. Sedangkan apabila t tabel lebih besar dari t hitung yang diperoleh artinya hipotesis ditolak. Level signifikan pada pengujian ini menggunakan 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2013). Penolakan dan Penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Apabila nilai probabilitas (*p-value*) kurang atau sama dengan 0,05, maka H₀ ditolak atau H_a diterima, ini menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat dan arah koefisien variabel sesuai dengan arah H_a.

- Apabila nilai signifikan (*p-value*) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, ini menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat dan arah koefisien variabel sesuai dengan arah H_a .



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Sample Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari masing-masing laporan keuangan perusahaan yang diambil dari situs web perusahaan dan situs BEI yaitu www.idx.co.id.

Metode pengukuran data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu peneliti menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan sampel. Berikut merupakan tabel kriteria penentuan sampel:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di dalam BEI pada periode 2015-2019.	53
2	Perusahaan yang melakukan penghapusan pencatatan (<i>delisting</i>) dari BEI pada periode 2015-2019.	(1)
3	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam <i>website</i> BEI atau <i>website</i> perusahaan pada periode 2015-2019.	(4)
4	Perusahaan yang memakai mata uang selain rupiah.	(15)
5	Perusahaan yang mengalami kerugian, minimal satu tahun selama periode 2015-2019.	(33)
6	Perusahaan yang tidak menyajikan data-data terkait variabel penelitian yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan	0
	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian	5
	Total sampel penelitian (5 perusahaan x 5 tahun)	25

4.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu informasi mengenai karakteristik terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari *mean* (rata-rata), *standard deviation* (standar deviasi), maksimum dan minimum (Ghozali, 2013). Berikut ini merupakan ringkasan hasil analisis deskriptif dari 6 variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 5 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan lima tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sehingga diperoleh 25 jumlah observasi

pengamatan dari total sampel perusahaan yang ada. Deskripsi dari variabel-variabel penelitian ditunjukkan oleh Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	25	0,0000	0,5323	0,3083	0,12285
ROA	25	0,0016	0,2119	0,0634	0,05776
SIZE	25	26,6393	30,8929	28,4722	1,39855
DER	25	0,2941	0,6900	0,4918	0,11397
KomAud	25	2	4	3,1200	0,52599
KA	25	0	1	0,4000	0,50000
INST	25	0,4641	1,0000	0,6799	0,16368

Sumber : Hasil olah data, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil data deskriptif pada variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) memperoleh nilai rata-rata besarnya perilaku penghindaran pajak sebesar 0,3083 dengan standar deviasi sebesar 0,12285 yang menunjukkan bahwa data tidak tersebar. Sedangkan pada nilai minimum menunjukkan 0,0000 dan nilai maximum menunjukkan 0,5323. Berarti, rata-rata perusahaan sampel atau perusahaan pertambangan saat ini membayarkan kas pajak kepada pemerintah hanya sebesar 30.83%. Artinya tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan tergolong tinggi. Penghindaran pajak yang tinggi yang dilakukan oleh perusahaan akan

menyebabkan penurunan penerimaan pajak pemerintah dari departemen perpajakan, sehingga negara akan mengalami kerugian melalui praktik penghindaran pajak ini.

2. Hasil data deskriptif pada variabel profitabilitas yang diukur menggunakan *return on asset* (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0634 artinya pada 5 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019, rata-rata kemampuan dalam menghasilkan laba sebesar 6,34% dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 0,05776 artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel profitabilitas adalah sebesar 0,05776 dari 25 kasus yang terjadi. Selama periode penelitian, variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,0016 yang artinya bahwa perusahaan sampel memiliki laba terendah sebesar 0,16% dari total aktiva yang dimiliki. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,2119 yang artinya kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan modalnya agar menghasilkan keuntungan tertinggi bagi perusahaan adalah sebesar 21,19%.
3. Hasil data deskriptif pada variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang besarnya diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan sampel menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh log total asset perusahaan dengan nilai rata-rata sebesar 28,4722 dan standar deviasi sebesar 1,39855 yang menunjukkan bahwa data tersebar. Semakin besarnya nilai log total

asset menunjukkan makin besarnya perusahaan tersebut karena kemampuan perusahaan tersebut untuk memiliki asset yang lebih banyak. Pada perusahaan sampel nilai terkecilnya sebesar 26,6393 dan nilai terbesar adalah 30,8929.

4. Hasil data deskriptif pada variabel *leverage* (DER) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4918 yang artinya rata-rata kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang guna membiayai aktivitas perusahaan adalah sebesar 49,18% standar deviasi sebesar 0,11397 yang menunjukkan data tidak tersedak. Nilai DER terendah pada perusahaan sampel adalah sebesar 0,2941 dan nilai tertinggi sebesar 0,6900. Semakin tinggi angka rasio DER, maka akan semakin tinggi komposisi total hutang pada perusahaan sampel.
5. Kemudian jika dilihat dari jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan, rata-rata perusahaan pertambangan sudah memiliki jumlah audit sebanyak 3 orang. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Komite Audit (KA) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,1200 dengan standar deviasi sebesar 0,52599 yang artinya rata-rata perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menempatkan komite audit dalam struktur pengawasannya sebanyak 3 orang dalam keanggotaan komite audit dengan jumlah anggota komite audit terendah adalah 2 orang dan terbanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang melanggar peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) nomor 55 yang menyatakan komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Hasil data deskriptif pada variabel kualitas audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4000 dengan standar deviasi sebesar 0,50000. Artinya, rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di BEI laporan keuangannya telah diaudit oleh auditor eksternal yang berkualitas yang termasuk dalam KAP Big Four yaitu sebanyak 50% dari keseluruhan sampel, sedangkan sisanya menggunakan jasa auditor yang bukan KAP Big Four.
7. Dan kemudian untuk variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6799 dengan standar deviasi sebesar 0,16368. Artinya, investor institusional mencakup dana pensiun, bank, perseroan terbatas, perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya yang memiliki saham dalam perusahaan sampel mencapai sebesar 67,99%. Sedangkan kepemilikan saham sisanya dimiliki oleh publik dan manajer. Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan mampu mempengaruhi manajer agar lebih fokus terhadap kinerja perusahaan dan mengawasi manajer sehingga tidak melakukan tindakan yang mementingkan dirinya sendiri. Berdasarkan rata-rata, kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan sampel cukup

tinggi, maka dapat dikatakan perusahaan sampel telah cukup baik terpantau oleh institusi lain.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga diperoleh estimator linier tidak bias yang dihasilkan dari model regresi dengan metode kuadrat terkecil. Model regresi yang diperoleh terdistribusi secara normal, terbebas dari gejala heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Berikut ini adalah hasil dari uji asumsi klasik:

1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk menganalisis dalam suatu regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusi secara normal. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi dianggap baik apabila distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan teknik analisis *Kolmogorov-Smirnov* (1-Sample K-S). Dengan digunakannya uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai dasar pengambilan keputusan adalah ketika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > yang artinya data terdistribusi secara normal. Hasil dari pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah.

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07193789
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.065
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.446
Asymp. Sig. (2-tailed)		.989

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olah data, 2020.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* yang ditunjukkan dari hasil uji normalitas adalah 0,446 dengan nilai signifikansi dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,989. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas dan pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Uji Multikolinieritas

Dilakukannya pengujian multikolinieritas untuk mencari tau apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam sebuah model regresi berganda. Suatu model regresi dikatakan baik ketika, tidak terjadi korelasi secara kuat antar variabel independent, apabila terjadi korelasi maka dinamakan terdapat *problem multikolinieritas*. Dalam model regresi, untuk mendeteksi adanya *problem multikolinieritas*

dapat dengan melihat nilai VIF dimana harus di bawah nilai 10. Apabila hasil regresi nilai VIF menunjukkan nilai diatas 10 maka di antara variabel bebas tersebut diindikasikan terdapat multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil perhitungan menggunakan pengujian regresi berganda untuk mencari tau nilai VIF dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini dengan bantuan *statistical software* SPSS:

Tabel 4.4
Nilai Variance Inflation Factor (VIF)

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ROA	.219	4.562
	SIZE	.124	8.033
	DER	.317	3.159
	KomAud	.371	2.693
	KA	.112	8.892
	INST	.717	1.394

a. Dependent Variable: CETR
Sumber : Hasil olah data, 2020.

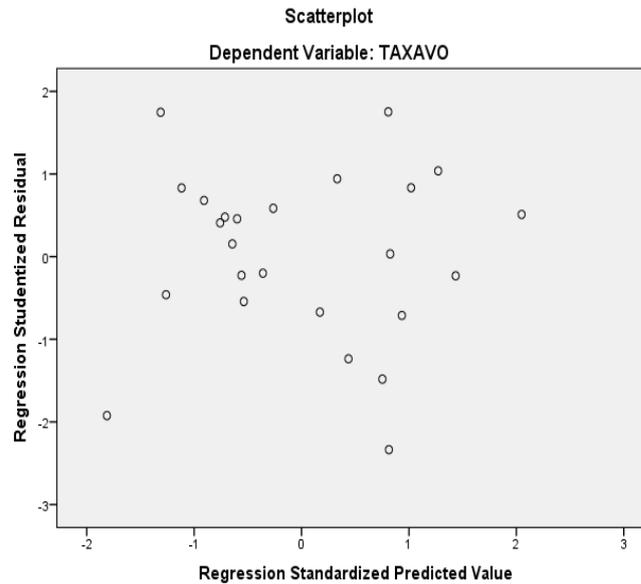
Hasil dari perhitungan uji multikolonieritas yang terdapat pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak terdapat *Variance Inflation Factor* (VIF) yang melebihi nilai 10 pada model regresi. Kemudian pada nilai *Tolarance* juga terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang

nilainya lebih besar dari 95%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mencari tau apakah penyimpangan model terjadi karena diantara satu observasi ke observasi lain terdapat jenis gangguan yang berbeda. Uji ini mengandung pengertian bahwa *variance* residual tidak sama untuk semua pengamatan. Apabila dari satu pengamatan ke pengamatan lain *variance* residual nya berbeda, maka dapat dikatakan dengan heteroskedastisitas namun tetap dinamakan homoskedastisitas, dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini cara yang dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat gejala Heteroskedastisitas atau tidak pada model regresi linear berganda adalah dengan menggunakan metode diagram *scatterplot*. Pada diagram *scatterplot*, suatu penelitian dinyatakan tidak heteroskedastisitas jika tidak ada titik menyebar secara acak dan pola tertentu, baik dibawah angka 0 maupun diatas angka 0 pada sumbu Y. Hasil dari grafik *scatterplot* ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1
Diagram Scatterplot



Sumber: Hasil olah data, 2020.

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola yang jelas. Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka grafik yang akan ditunjukkan adalah titik-titik yang membentuk gelombang atau pola tertentu secara teratur menyebar kemudian menyempit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena grafik *scatter plot* dalam model regresi tersebut menunjukkan pola yang tidak jelas atau tidak teratur.

4. Uji autokorelasi

Tujuan dilakukannya pengujian autokorelasi adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan yang sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linear. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dengan melihat koefisien korelasi DW test yg dilakukan dalam uji DW (Durbin Watson). Apabila nilai DW lebih besar dari DU dan $(4- DU)$ lebih besar dari DW atau bisa dinotasikan dengan $DU < DW < (4-DU)$ dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Hasil perhitungan uji autokorelasi dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.811 ^a	.657	.543	.083067	2.289

a. Predictors: (Constant), INST, DER, KomAud, SIZE, ROA, KA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil olah data, 2020.

Dari hasil pengujian autokorelasi di atas diperoleh nilai DW test sebesar 2,289 yang nilainya menunjukkan berada diantara 1,66 sampai 2,34 yang artinya tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

4.4 Hasil Analisis Linier Berganda

Digunakannya analisis ini untuk untuk mengukur seberapa besar pengaruh 6 variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam BEI. Hasil dari perhitungan regresi berganda dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.6

Ringkasan Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig. t	Keterangan
Konstanta	-3,341			
ROA	1,995	3,181	0,005	Signifikan
SIZE	0,139	4,045	0,001	Signifikan
DER	-0,359	-1,356	0,192	Tidak Signifikan
KomAud	-0,120	-2,262	0,036	Signifikan
KA	-0,426	-4,215	0,001	Signifikan
INST	0,305	2,497	0,022	Signifikan
F _{hitung}	5,749			
Sig. F	0,002			
Adjusted R ²	0,543			

Variabel dependen : Perilaku penghindaran pajak

Sumber: Hasil olah data, 2020.

Dari Tabel 4.5 di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CETR} = -3,341 + 1,995\text{ROA} + 0,139\text{SIZE} - 0,359\text{DER} - 0,120\text{KomAud} - 0,426\text{KA} + 0,305\text{INST}$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan nilai konstanta CETR sebesar -3,341. Koefisien negatif mengandung arti bahwa pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi memiliki hubungan berbanding terbalik dengan CETR. Dengan kata lain variabel lain tersebut memiliki hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak, mengingat CETR dan penghindaran pajak memiliki hubungan negatif. Oleh karena itu nilai konstanta sebesar -3,341 memiliki makna apabila variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komide audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional adalah nol maka terjadi penghindaran pajak senilai 3,341.
2. Variabel profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 1,995 dengan tingkat signifikan sebesar 0,005 dan ini signifikan, sehingga perubahan yang terjadi pada profitabilitas akan menyebabkan perubahan pada perilaku penghindaran pajak. Dikarenakan hubungannya positif, maka apabila profitabilitas mengalami kenaikan satu per satuan, maka perilaku penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 1,995 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.

3. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki koefisien regresi sebesar 0,139 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 dan ini signifikan, sehingga perubahan yang terjadi pada ukuran perusahaan akan menyebabkan perubahan pada perilaku penghindaran pajak. Dengan kata lain, apabila ukuran perusahaan mengalami kenaikan satu per satuan, maka perilaku penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,139 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
4. Variabel *leverage* memiliki koefisien regresi sebesar -0,359 dengan tingkat signifikan sebesar 0,192. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Kemungkinan hal ini karena perusahaan sampel dalam membiayai operasionalnya lebih banyak menggunakan pendanaan yang berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak berelasi yang akan mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang harus dibayarkan semakin besar, sehingga perusahaan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan pembiayaan dengan utang secara besar-besaran. Penggunaan utang dengan jumlah yang besar akan menimbulkan risiko yang besar yang akan dihadapi perusahaan, sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko atas utang yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak

5. Variabel komite audit memiliki koefisien regresi sebesar $-0,120$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,036$ dan ini signifikan. Dikarenakan hubungannya negatif, maka apabila komite audit mengalami kenaikan satu per satuan, maka perilaku penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar $0,120$ dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
6. Variabel kualitas audit memiliki koefisien regresi sebesar $-0,426$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,001$ dan ini signifikan. Dikarenakan hubungannya negatif, maka apabila kualitas audit mengalami kenaikan satu per satuan, maka perilaku penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar $0,426$ dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
7. Variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar $0,305$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,022$ dan ini signifikan. Dikarenakan hubungannya positif, maka apabila kepemilikan institusional mengalami kenaikan satu per satuan, maka perilaku penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar $0,305$ dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.

4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji statistik t, yaitu pengujian yang menunjukkan pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji t dapat ditunjukkan pada Tabel 4.6 diatas. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

pengaruh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional secara parsial terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak**

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi t dari variabel profitabilitas sebesar 0,005 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,995. Dikarenakan nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi Profitabilitas yang dicapai perusahaan akan semakin tinggi perilaku Penghindaran Pajak yang akan dilakukan perusahaan. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti.

2. **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak**

Dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$, diperoleh nilai signifikansi t pada ukuran perusahaan sebesar 0,001 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,139. Dikarenakan nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti pada variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti.

3. Pengaruh Leverage Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$, diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,192 dan memiliki koefisien regresi sebesar -0,359. Dikarenakan nilai signifikan t lebih besar dari 0,05, hal ini berarti *leverage* tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak tidak terbukti.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikansi t dari variabel komite audit sebesar 0,036 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,120. Dikarenakan nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan *satus internasional* berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti.

5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikansi t dari variabel kualitas audit sebesar 0,001 dan memiliki nilai koefisien regresi

sebesar -0,426. Dikarenakan nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti.

6. **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Perilaku Penghindaran pajak**

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikansi t dari variabel kepemilikan institusional sebesar 0,022 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,305. Dikarenakan nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga hipotesis keenam yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti.

4.6 **Koefisiensi Determinasi (R^2)**

Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dapat ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinasi (R^2). Pada intinya, koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 diperoleh nilai *Adjusted R square* sebesar 0,543, hal ini berarti variasi perubahan perilaku penghindaran pajak dipengaruhi oleh variasi dari profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional sebesar 54,3% dan sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini. Dengan nilai koefisien *Adjusted R Square* yang hanya sebesar 0,543 maka kemampuan variabel dependennya relatif rendah sedangkan kemampuan variabel independen yang baik dalam menjelaskan variasi variabel dependennya apabila memiliki nilai *Adjusted R Square* yang mendekati nilai 1.

4.7 Pembahasan

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki hasil positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka penghasilan yang diperoleh perusahaan tersebut juga makin meningkat. Kemudian pada pengenaan pajak terutang didasarkan pada jumlah penghasilan neto yang merupakan ketentuan tarif pajak atas penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga perusahaan

dengan kemampuan memperoleh laba tinggi akan membayar pajak yang tinggi juga setiap tahunnya. Dengan semakin tingginya beban pajak pada perusahaan dapat memunculkan adanya kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Chen *at al* (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai ROA yang berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki peluang untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak yang akan mengurangi jumlah beban pajaknya. Salah satu tugas pengelolaan keuangan untuk menjaga profitabilitas tetap tinggi dan stabil adalah dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk mengatur pengeluaran pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka melalui tindakan penghindaran pajak. Sehingga peningkatan profitabilitas perusahaan cenderung meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi return on asset maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, dengan begitu perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dewinta & Setiawan (2016) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan cenderung stabil didukung oleh manajemen

keuangan yang baik. Artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya.

2. **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak**

Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin besar sebuah perusahaan maka semakin besar juga aset yang dimiliki, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan lebih stabil (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Manajer pada perusahaan besar akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode yang akan datang, sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan (Achmad, Subekti, & Sari, 2007). Hal ini sejalan dengan penelitian Swingly & Sukartha (2015) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. **Pengaruh *Leverage* Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi, variabel leverage memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,359 dengan nilai signifikansi sebesar 0,192. Artinya variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, hal ini menjelaskan bahwa hipotesis yang

menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak tidak terbukti. Tidak adanya pengaruh ini terjadi karena perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya, sehingga beban bunga yang dimiliki akan semakin rendah dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini belum sependapat dengan Lanis & Richardson (2013) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013) Darmawan & Sukartha (2014), Pradipta & Supriyadi (2015), Ngadiman & Puspitasari (2017), Dewinta & Setiawan (2016), Saifudin & Yunanda (2016), dan Cahyono et al. (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Variabel komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Komite Audit maka kebijakan penghindaran pajak yang diambil perusahaan akan semakin rendah. Menurut Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Maharani & Suardana (2014), N. N. K. Dewi & Jati (2014) serta Sandy & Lukviarman

(2015) yang membuktikan bahwa semakin banyak jumlah Komite Audit maka kebijakan penghindaran pajak yang diambil perusahaan akan semakin rendah.

5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Variabel kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti. Adanya pengaruh ini menunjukkan bahwa kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Dalam memilih auditor bisa diukur dengan spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang terdapat di KAP BIG 4 lebih kompeten dan profesional.

6. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, sehingga hipotesis keenam yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi tingkat investasi yang dimiliki oleh institusi baik oleh badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing akan menyebabkan semakin tingginya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Merslythalia dan Lasmana (2017) yang menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusional maka semakin besar tekanan kepada pihak manajemen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, pihak investor institusional akan menetapkan kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan keuntungan seperti kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak, karena pajak merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mencapai keuntungan perusahaan. Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan keberadaan investor institusional memberi tekanan kepada manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dalam memperoleh laba yang maksimal, sehingga semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar juga penghindaran pajak yang dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui tahap beberapa tahap yang telah dilakukan yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data didapatkan hasil analisis terkait pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Artinya, apabila profitabilitas perusahaan semakin besar maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin tinggi.
2. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Artinya, apabila ukuran perusahaan semakin besar maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin tinggi.
3. Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini berarti besar kecilnya *leverage* belum mampu menurunkan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.
4. Variabel komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Semakin besar anggota komite audit perusahaan maka akan menurunkan penghindaran pajak.

5. Variabel kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Semakin berkualitas auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan (the Big Four) maka semakin tinggi pula kualitas audit, dengan begitu penghindaran pajak semakin rendah.
6. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini hanya menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan sampel, sehingga kurang begitu menggeneralisasikan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan.

5.3 Saran

Saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti atau menambahkan variabel independen lain diluar variabel penelitian ini dan menggunakan proksi selain proksi yang digunakan pada penelitian ini. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel, seperti koneksi politik, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, karakteristik eksekutif serta *corporate social*

responsibility (CSR). Agar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya dapat lebih besar.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator lain dalam mengukur penghindaran pajak selain *Cash Effective Tax Rate* (CETR), seperti *Effective Tax Rate* (ETR), *Total Book-Tax Differences* (BTD) dan *Domestic Tax Reporting Service* (DTAX).

5.4 Implikasi Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan mampu memperbaiki dan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk membayarkan pajaknya, sehingga dapat dengan senantiasa mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya adalah Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memperbaiki dan terus memperhatikan celah-celah yang terdapat dalam peraturan yang bisa digunakan oleh perusahaan sebagai kesempatan mengelak pajaknya, serta dapat mempublikasikan laporan pembayaran pajak perusahaan sehingga mampu mempersempit perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, serta.

3. Bagi Investor

Investor diharapkan agar selalu memperhatikan apabila terdapat kendala dalam lingkungan investasi saat menetapkan kebijakan-kebijakan saat melakukan investasi. Perlu dilakukan hal ini agar tujuan investor saat berinvestasi pada perusahaan dapat tercapai.

4. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk mengembangkan penelitian lain yang terkait penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk mengembangkan teori terkait penghindaran pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, K., Subekti, I., & Sari, A. (2007). Investigasi motivasi dan strategi manajemen laba pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Tema*, 8(1).
- Agusti, W. Y. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahu 2009-2012). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 4(2), 1–32.
- Ahniar, N. F. (2017). Peta Jalan Ungkap Kedok Pemilik Perusahaan Tambang. Retrieved from Katadata.co.id
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2008). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance, 123–136.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 1831–1859.
- Ary, T. G. (2011). *Manajemen Investasi – Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Asri, Y. I. A. T., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak, 16, 72–100.
- Azizah, N., & Kumalasari, R. (2017). Pengaruh profitabilitas, rasio hutang, ukuran perusahaan dan jenis perusahaan terhadap, 130–142.
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*, XV.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013, 2(2).
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 1(95), 41–61.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage , Return On Assets , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak, 1, 143–161.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage,

Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21, 882–911.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>

Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia, 2, 249–260.

Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.

Dharma, I., & Ardiana, P. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 584–613.

Eksandy, A. (2014). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak, 1(1), 1–20.

Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>

Gemilang, D. N. (2017). Pegaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2013-2015). *Skripsi*, 1–121.

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Strategic Management Journal*, 13(4), 223–242. <https://doi.org/10.1002/mde.1218>

Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jrak*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>

KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Retrieved from www.governance-indonesia.or.id

Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.

- Lanis, R., & Richardson. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing, And Accountability Journal*, 26(1), 75–100.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 2028–2054.
- Luke, & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 13(1), 80–96.
- Lumbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak* (Edisi Revi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , 2, 525–539.
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 117. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>
- Nachrowi, D., & Usman, H. (2008). *Penggunaan Teknik Ekonometri* (Edisi revi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Novriansa, A. (2019). Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing? Retrieved from https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=280
- Okrayanti, T. Y., Utomo, S. W., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5(1), 804–817.
- Oktofian, M. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013), 66, 37–39.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2015). POJK Nomor

55/POJK.04/2015 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Pemerintah Indonesia*, 1–14. Retrieved from www.ojk.go.id

- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XV(1), 1–25.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia, 19(1), 38–46.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahmawati, A. D., Topowijono, & Sri, S. (2015). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL, DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 23(2), 85999.
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The effects of the corporate's characteristics on tax avoidance moderated by earnings management (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–169.
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, (c), 472–483. Retrieved from <http://fe.unp.ac.id/>
- Rosalia, Y., & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(3), 1–20.
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014). *WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 6(2), 131–143. <https://doi.org/10.30741/wiga.v6i2.121>

- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sartika, M. (2015). ANALISIS PERBEDAAN PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN PERUSAHAAN YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN TIDAK FINAL. *Jom. FEKON*, 2(1), 1–15.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sartori, N. (2010). Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance.
- Siallagan, H., & Machfoedz, M. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, (61), 23–26.
- Suandy, E. (2008). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyanto, H. S. (2018). *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Surbakti, T. A. V. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar*. Jakarta: Prenada Media.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Wijaya, M., & Martani, D. (2011). PRAKTIK MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN DALAM MENANGGAPI PENURUNAN TARIF PAJAK SESUAI UU NO. 36 TAHUN 2008. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, (36), 21–22.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Chomsatu, Y. (2017). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, GCG DAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Journal of Economic and Economic Education*, 5(2), 287–295. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758>

Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.





LAMPIRAN



LAMPIRAN 1**DAFTAR SAMPEL PENELITIAN**

NO	EMITEN	NAMA PERUSAHAAN
1.	PTBA	Bukit Asam Tbk
2.	ELSA	Elnusa Tbk
3.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk
4.	CTTH	Citatah Tbk
5.	IFSH	Ifishdeco Tbk



LAMPIRAN 2

DATA HASIL PERHITUNGAN VARIABEL CETR

NO	EMITEN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PTBA	0.276	0.280	0.264	0.269	0.282
2.	ELSA	0.260	0.257	0.256	0.215	0.236
3.	RUIS	0.411	0.525	0.475	0.393	0.347
4.	CTTH	0.511	0.220	0.321	0.266	0.434
5.	IFSH	0.000	0.272	0.532	0.151	0.257

DATA HASIL PERHITUNGAN VARIABEL ROA

NO	EMITEN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PTBA	0.121	0.109	0.207	0.212	0.155
2.	ELSA	0.086	0.075	0.052	0.049	0.052
3.	RUIS	0.038	0.027	0.022	0.027	0.026
4.	CTTH	0.003	0.034	0.007	0.002	0.002
5.	IFSH	0.055	0.057	0.017	0.049	0.082

DATA HASIL PERHITUNGAN VARIABEL SIZE

NO	EMITEN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PTBA	30.46	30.55	30.72	30.82	30.89
2.	ELSA	29.11	29.06	29.21	29.36	29.55
3.	RUIS	27.72	27.61	27.59	27.62	27.86
4.	CTTH	27.13	27.15	27.27	27.32	27.36
5.	IFSH	26.85	26.64	26.93	27.21	27.81

DATA HASIL PERHITUNGAN VARIABEL DER

NO	EMITEN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PTBA	0.450247	0.431957	0.372370	0.326945	0.294091
2.	ELSA	0.402114	0.313344	0.371433	0.416650	0.474404
3.	RUIS	0.690027	0.632614	0.603596	0.590096	0.653974
4.	CTTH	0.522860	0.488678	0.541004	0.554736	0.567964
5.	IFSH	0.571694	0.345368	0.518511	0.595664	0.565893

DATA HASIL PERHITUNGAN VARIABEL KOMITE AUDIT

NO	EMITEN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PTBA	4	3	4	4	4
2.	ELSA	4	3	3	3	3
3.	RUIS	3	3	3	3	3

4.	CTTH	3	3	2	2	3
5.	IFSH	3	3	3	3	3

LAMPIRAN 2 (LANJUTAN)

DATA HASIL PERHITUNGAN VARIABEL KUALITAS AUDIT

NO	EMITEN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PTBA	1	1	1	1	1
2.	ELSA	1	1	1	1	1
3.	RUIS	0	0	0	0	0
4.	CTTH	0	0	0	0	0
5.	IFSH	0	0	0	0	0

DATA HASIL PERHITUNGAN VARIABEL KEPEMILIKAN INST

NO	EMITEN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PTBA	0.711	0.711	0.711	0.711	0.679
2.	ELSA	0.683	0.560	0.560	0.560	0.560
3.	RUIS	0.675	0.611	0.598	0.655	0.657
4.	CTTH	0.522	0.519	0.522	0.464	0.530
5.	IFSH	1.000	1.000	1.000	1.000	0.800

LAMPIRAN 3
HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Statistik Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAXAVO	25	.0000	.5323	.3083	.12285
ROA	25	.0016	.2119	.0634	.05776
SIZE	25	26.6393	30.8929	28.4722	1.39855
DER	25	.2941	.6900	.4918	.11397
KomAud	25	2	4	3.1200	.52599
KA	25	0	1	.4000	.50000
INST	25	.4641	1.0000	.6799	.16368
Valid N (listwise)	25				

Uji Asumsi Klasik:

Hasil Uji Normalitas (NPar Tests)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07193789
	Absolute	.089
Most Extreme Differences	Positive	.065
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.446
Asymp. Sig. (2-tailed)		.989

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

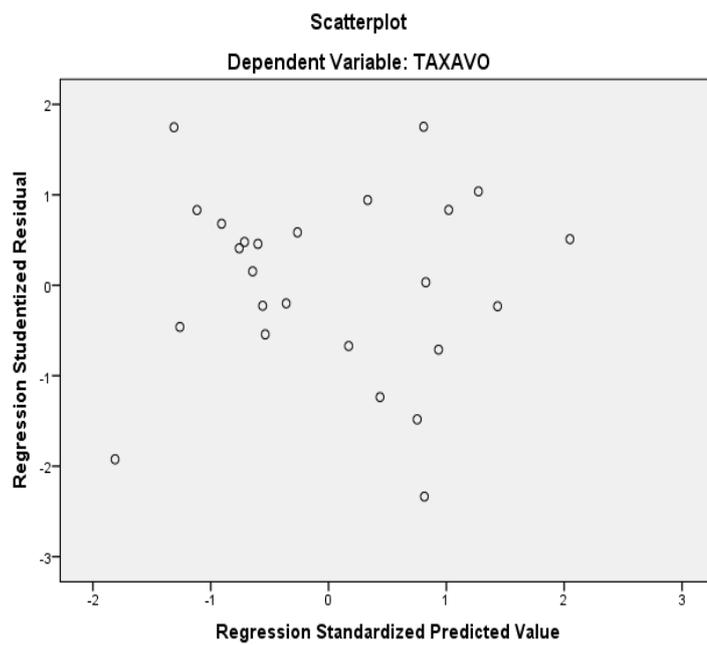
Hasil Uji Autokorelasi

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	ROA	.219	4.562
	SIZE	.124	8.033
	DER	.317	3.159
	KomAud	.371	2.693
	KA	.112	8.892
	INST	.717	1.394

a. Dependent Variable: TAXAVO

Hasil Uji Heteroskedastisitas Charts



Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.811 ^a	.657	.543	.083067	2.289

a. Predictors: (Constant), INST, DER, KomAud, SIZE, ROA, KA

b. Dependent Variable: TAXAVO



Regresi Linier Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	INST, DER, KomAud, SIZE, ROA, KA ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: TAXAVO

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.811 ^a	.657	.543	.083067

a. Predictors: (Constant), INST, DER, KomAud, SIZE, ROA, KA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.238	6	.040	5.749	.002 ^b
	Residual	.124	18	.007		
	Total	.362	24			

a. Dependent Variable: TAXAVO

b. Predictors: (Constant), INST, DER, KomAud, SIZE, ROA, KA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.341	.900		-3.714	.002
ROA	1.995	.627	.938	3.181	.005
SIZE	.139	.034	1.582	4.045	.001
DER	-.359	.264	-.333	-1.356	.192
KomAud	-.120	.053	-.512	-2.262	.036
KA	-.426	.101	-1.735	-4.215	.001
INST	.305	.122	.407	2.497	.022

a. Dependent Variable: TAXAVO

